BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara haruslah sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penyelenggara negara serta warga negara semata-mata berdasarkan hukum dengan dinamika keseluruhan elemen, komponen, hirarki serta aspek-aspek yang bersifat sistematis dan saling berkaitan satu sama lain. Sehingga dalam negara hukum, tujuan daripada hukum itu adalah mengatur pergaulan manusia secara damai. Prinsip dari negara hukum adalah adanya jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. Dalam dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam suatu negara hukum, pastinya terdapat tindakan atau perilaku oleh masyarakat atau individu yang melanggar peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, hal ini disebut sebagai kriminalitas. Kriminalitas atau tindak kejahatan merupakan perilaku dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas.¹

¹ Bayu Putro Bintang Pamungkas, 2015, **Kendala Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Kepolisian Resort Kediri Kota)**, Jurnal, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 1

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Edisi III mendefinisikan kriminalitas sebagai hal-hal yg bersifat kriminal atau perbuatan yg melanggar hukum pidana.

Banyak kasus kriminalitas yang terjadi di negara Indonesia. Berbagai kasus kriminalitas tersebut pun mulai dari pencurian, penipuan, perampokan, pemerasan, dan segala perilaku yang berakibat timbulnya ancaman serta kerugian pada korban. Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu perbuatan tindak pidana.² Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada pihak individu saja yang menderita akibat kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, maupun pemerintah.³ Sedangkan, tindak pidana ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Tindakan dari suatu kasus kriminalitas tentunya tidak dapat ditolerir keberadaannya dan oleh karenanya segala tindakan tersebut mendapat perlawanan penuh dari masyarakat. Penjahat dengan kejahatan atau kriminalitasnya juga telah menimbulkan keresahan, kecemasan, kegoncangan, dan perasaan yang selalu khawatir bagi masyarakat umum, disamping itu juga menimbulkan rasa tidak tenang, tidak aman, serta damai dalam kehidupan masyarakat.⁴ Pencurian sebagai salah satu tindakan kriminalitas yang kasusnya banyak dijumpai dalam masyarakat adalah suatu perbuatan mengambil barang

² Ainal Hadi dan Mukhlis, 2012, **Kriminologi dan Viktimologi**, CV. Bina Nanggroe, Banda Aceh, hlm. 155

³ *Ibid*

⁴ Putu Sekarwangi Saraswati, 2015, **Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan**, Jurnal Advokasi, Fakultas Hukum Unmas Denpasar, Volume 5, Nomor 2, hlm. 141

milik orang lain yang bukan hak nya dengan jalan yang tidak sah. Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda atau kekayaan, hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-370 KUH Pidana. Penjelasan dalam pasal tersebut sebagai berikut:

1. Dalam pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-". Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut.
2. Kemudian tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur pada Pasal 363 yang terdiri dari 2 ayat, berbunyi: Ayat (1), "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. pencurian ternak; 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih; 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Kemudian penjelasan pada ayat (2) berbunyi, "Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun". Dalam Pasal 363 terdapat pernyataan mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Unsur-unsur pada Pasal 362 KUH Pidana yaitu Barangsiapa, Mengambil, Barang sebagian atau seluruhnya, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Selain itu, terdapat satu unsur tambahan yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Oleh karena itu, suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur itu patut diduga merupakan suatu tindak pidana pencurian. Ancaman hukumannya maksimal adalah 5 tahun penjara.

3. Kemudian dalam Pasal 364 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan kematian, luka berat, atau luka-luka berat pada orang yang menjadi korban. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.
4. Pasal 365 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun.

5. Pasal 366 KUHP menjelaskan tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pegawai swasta yang dalam kedudukan sebagai pengurus, pengawas, atau pemegang jabatan yang melibatkan pengelolaan barang. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun.
6. Pasal 367 KUHP membahas tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh orang yang secara teratur melibatkan diri dalam kegiatan pencurian. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun.
7. Pasal 368 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dalam kelompok atau bersama-sama dengan paling sedikit tiga orang. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun.
8. Pasal 369 KUHP membahas tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yang menjadi korban. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.
9. Pasal 370 KUHP mengatur tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat pada orang yang menjadi korban. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun.

Kasus kriminalitas tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan cara merusak seperti yang menimpa Sekaa Angklung Sidha Karya, Banjar Pasekan Belodan, Desa Dajan Peken, Tabanan yang dimana terjadi

pencurian perangkat gamelan angklung berupa daun-daun angklung. Kasus pencurian perangkat gamelan angklung tersebut terjadi pada tanggal 13 Mei 2022, awalnya perangkat gamelan masih tersimpan dengan rapi di Bale Banjar. Perangkat gamelan angklung digunakan terakhir kali dalam upacara piodalan pura pada tanggal 5 Mei 2022. Kemudian dari hasil olah TKP, pelaku mencopot 15 (lima belas) bilah gamelan angklung yang berbahan perunggu bercampur siem serta membawanya kabur. Satu angklung terdiri dari empat bilah, sehingga total bilah angklung yang dicuri sebanyak 60 (enam puluh) bilah angklung. Selain itu, pelaku juga mencopot instrument angklung lainnya yakni satu reong. Satu reong terdiri dari empat buah anak reong, sedangkan gong yang berada di dalam masih dalam keadaan lengkap dan rapi. Jadi, total kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian itu diperkirakan mencapai kurang lebih Rp 200 juta. Kejadian aksi pencurian itu baru diketahui pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 Wita oleh I Gede Made Sapta Yuliarmiga yang hendak menyiapkan peralatan gamelan untuk latihan Sekaa Gong Istri atau kelompok penabuh yang terdiri dari Ibu-Ibu. Kondisi itu kemudian Ia laporkan kepada Kelian Tempek dan lanjut ke Penglingsir Banjar Pasekan Belodan, I Made Sukadana dan I Nyoman Sukanada, untuk memeriksa secara bersama-sama. Dari hasil olah TKP dan proses identifikasi yang dilakukan oleh Polsek Tabanan, pelaku diduga masuk ke tempat penyimpanan perangkat gamelan angklung dengan menjebol pintu belakang. Proses penegakan hukum terhadap kasus pencurian perangkat gamelan angklung Sekaa Sidha Karya masih di dalam tahap penyidikan, hal ini disebabkan karena barang bukti tidak ditemukan tetapi pelaku telah mengakui akan perbuatannya tersebut. Dari hasil interogasi pelaku mengakui bahwa

barang bukti berupa perangkat gamelan angklung tersebut telah ia jual kepada seseorang yang tidak dikenal (orang rongsok). Hal ini menyulitkan pihak kepolisian dalam menelusuri pencarian barang bukti dan memproses secara hukum untuk melakukan penegakan hukum dalam kasus tersebut.

Beberapa kasus tindak pidana pencurian mungkin tidak bisa ditangani dan diselesaikan oleh kepolisian karena setiap kasus memiliki hal karakteristik tindak pidana yang berbeda. Namun hal ini menuntut kinerja ekstra dari instansi kepolisian serta aparat penegak hukum lainnya agar cepat bertindak dalam mengatasi masalah demi terciptanya penegakan hukum di lingkungan masyarakat terutama dalam bentuk pemberian perlindungan hukum. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban dan memastikan bahwa pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal. Dalam kasus pencurian perangkat gamelan angklung Sekaa Sidha Karya, pihak kepolisian belum dapat melanjutkan proses hukum karena barang bukti berupa perangkat gamelan angklung telah dijual kepada pelaku dan kepolisian kesulitan untuk menindaklanjuti pencarian barang bukti tersebut. Ketika barang bukti tidak dapat ditemukan, upaya perlindungan hukum terhadap korban menjadi terhambat yang pada akhirnya bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke-4 (empat) yang berbunyi, "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Pengejawantahan dari alinea tersebut diuraikan dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D

ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Perlindungan hukum sebagai suatu konsep yang universal dari negara hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan atau tindak kriminal sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁵ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana sering mendapatkan perhatian yang kurang. Korban dari suatu tindak pidana merupakan pihak yang paling dirugikan tetapi tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang terhadap tersangka atau terdakwa dari suatu tindak pidana. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, perlindungan tidak berpihak kepada korban dari suatu tindak pidana karena lebih banyak mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa. Terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa lebih populer diatur di dalam Pasal 50 – 68 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Jika diteliti di dalam KUHP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa, daripada hak-hak korban. Hal tersebut disebabkan karena korban dari suatu tindak pidana dan masyarakat secara otomatis diwakili oleh negara dengan cara

⁵ Soerjono Soekanto, 1984, **Pengantar Penelitian Hukum**, Uj Press, Jakarta, hlm. 133

mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa.⁶ Dalam proses peradilan pidana yang bertumpu pada hukum pidana dan hukum acara pidana, negara melalui organ-organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*). Jika terjadi tindak pidana, maka pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan dan diberikan sanksi pidana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul:

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN PERANGKAT GAMELAN ANGKLUNG SEKAA SIDHA KARYA OLEH POLRES TABANAN".

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencurian perangkat gamelan angklung Sekaa Sidha Karya oleh Polres Tabanan?
2. Apa kendala dalam penegakan hukum terhadap pencurian perangkat gamelan angklung Sekaa Sidha Karya oleh Polres Tabanan?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah merupakan sebuah bingkai dalam penelitian dilakukan yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan serta membatasi area pada penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan uraian yang lebih terarah agar terhindar dari pembahasan yang menyimpang dari permasalahan yang dikemukakan, sehingga perlunya diadakan pembatasan

⁶ Irma Dewi Ningsih Berutu, Ainal Hadi, 2020, **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singkil)**, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 4, Nomor 3, hlm. 406

pembahasan terhadap permasalahan tersebut melalui ruang lingkup masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam permasalahan pertama, ruang lingkup pembahasannya mengenai perlindungan hukum terhadap pencurian perangkat gamelan angklung Sekaa Sidha Karya oleh Polres Tabanan.
2. Dalam permasalahan kedua, ruang lingkup pembahasannya mengenai kendala dalam penegakan hukum terhadap pencurian perangkat gamelan angklung Sekaa Sidha Karya oleh Polres Tabanan.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam memaparkan pikirannya secara tertulis.
2. Melaksanakan kewajiban mahasiswa dalam melaksanakan salah satu dari tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya dalam bidang penelitian yang di lakukan oleh mahasiswa.
3. Melanjutkan pengembangan pemikiran dari apa yang telah di dapatkan pada bangku perkuliahan.
4. Mengembangkan tugas mahasiswa dalam berbaur di dalam masyarakat.
5. Memperdalam keilmuaan mahasiswa utamanya dalam bidang ilmu hukum.

1.4.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami serta mengetahui perlindungan hukum terhadap pencurian perangkat gamelan angklung Sekaa Sidha Karya oleh Polres Tabanan.
2. Untuk memahami serta mengetahui kendala dalam penegakan hukum pencurian perangkat gamelan angklung Sekaa Sidha Karya oleh Polres Tabanan.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁷ Metode juga dapat digunakan sebagai pembimbing untuk dapat menemukan suatu hasil dari suatu penelitian maupun penulisan yang mempunyai validitas (kesahan) dan akurasi (kecermatan yang tinggi dan benar).

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.⁸ Metode penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan

⁷ Soerjono Soekanto, 1981, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, (selanjutnya disingkat Soekanto II), hlm. 7

⁸ Bahder Johan Nasution, 2008, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, hlm. 124

berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Objek kajian dalam penelitian empiris adalah fakta social. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi social suatu unit social, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Penelitian hukum empiris dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati didalam kehidupan nyata, dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu bagaimana perlindungan hukum serta kendala dalam penegakan hukum terhadap pencurian perangkat gamelan angklung Sekaa Sidha Karya oleh Polres Tabanan.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Sosiologis Hukum. Pendekatan sosiologis hukum yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala social dengan gejala-gejala social lain. Pendekatan sosiologis hukum melihat realitas hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat. Pendekatan sosiologis juga merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya mengenai suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Pendekatan ini melihat gejala-gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris ini yaitu, sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat dan keterangan hasil wawancara dari narasumber.⁹ Data primer dapat dibentuk melalui opini dari subjek (orang) baik secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari informasi di Polres Tabanan, Kelian Angklung, dan Anggota Sekaa Angklung Sidha Karya Banjar Pasekan Belodan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis data yang dijadikan pendukung data pokok berupa bahan pustaka yang memberikan informasi untuk memperkuat data pokok. Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian seperti Peraturan Perundang – Undangan, Buku, Makalah, Jurnal, Konsep Hukum dan literatur hukum yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu data-data yang sudah terdokumentasi dalam bentuk bahan-bahan hukum.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan acuan bidang hukum yang digunakan untuk memuat informasi-informasi yang relevan, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

⁹ Soerjono Soekanto, 2012, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, hlm. 12

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah situasi antara pribadi dengan bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait isu penelitian.

2. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

3. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Analisa Data secara kualitatif dengan cara menyusun data secara sistematis dengan memilih data yang berkualitas untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Pendekatan kualitatif ini terpusat pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala social budaya, sehingga suatu gambaran hasil penelitian lengkap, informasi yang disampaikan terlihat hidup, berpijak pada sebuah kenyataan yang ada, serta sesuai dengan kejadian yang

sebenarnya. Teknik penyajian dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1.6. Sistematika Penulisan

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis, sehingga penulis menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Bab ini secara umum terdiri dari Pendahuluan yang di dalamnya menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian yang berisi (Tujuan Umum dan Tujuan Khusus), Metode Penelitian yang berisi (Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data), serta Sistematika Penulisan.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak terlepas dari adanya teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, konsep hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan teori hukum dan konsep hukum dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat consensus yang dapat ditemukan dengan upaya

penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

1.6.3 BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN PERANGKAT GAMELAN ANGKLUNG SEKAA SIDHA KARYA OLEH POLRES TABANAN

Pada bab III ini terbagi menjadi dua sub bab dan membahas tentang perlindungan hukum terhadap pencurian perangkat gamelan angklung Sekaa Sidha Karya oleh Polres Tabanan dan Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Perangkat Gamelan Angklung Sekaa Sidha Karya di Wilayah Hukum Polres Tabanan.

1.6.4 BAB IV KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN PERANGKAT GAMELAN ANGKLUNG SEKAA SIDHA KARYA OLEH POLRES TABANAN

Pada bab IV ini membahas tentang, apa saja kendala-kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pencurian perangkat gamelan angklung Sekaa Sidha Karya oleh Polres Tabanan.

1.6.5 BAB V PENUTUP

Pada bab V ini menjadi bab terakhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dalam bentuk simpulan serta memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.